

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adiputra, M. S. (2021). *Metodologipenelitian Kesehatan*. Medan: Yaya Kita Menulis.
- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi : Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Boediono. (2012). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Eka, S. (2017). *Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial Di Indonesia*. Yogyakarta: Espose, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota.
- Emzir. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kementrian Keuangan. (2011). *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2011 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011*. Jakarta: Kementrian Keuangan.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (SKAP). (2006). *Buletin Nomor 04 Tentang Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Purnomo, B. S. (2009). *Obligasi Daerah Alternatif Investasi Bagi Masyarakat Dan Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah Daerah Panduan Praktis Penerbitan Obligasi Daerah*. Bandung: Bandung: Alfabeta.
- Putirani, & Sri. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Periode 1999-2009*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Rosyada, D. (2017). *Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Jakarta: Alfabet.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKARI.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Jakarta: ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan. Edisi Kedua*, 332.
- Suparmoko, M., & Maria, R. (2000). *Pokok-Pokok Ekonomika*. Yogyakarta: BPFE.

#### **Jurnal:**

- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 96.
- Fauzi, A., & Isnayati, L. M. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pt XI Axiata Tbk. (Excl) Sebelum Dan Sesudah Akuisisi. *Jemper (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan)*, 1-8.
- Hariato, D., & Adi, P. H. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Perkapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 2-4.
- Hermawan, R. R. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal Of Science Research*, 7434-7450.
- Hikmah, A. W. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Alokasi Umum (Dau) Pendapatan Asli Daerah (Pad), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Luas Wilayah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal.
- Ifa, K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Globa Vol.02, No.01*, 19.
- Izza, M. A., Wachdah, F. L., & Yasin, M. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. *Trending : Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 42-50.

- Karouw, T. L., Engka, D., & Tolosang, K. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 78.
- Kasyati. (2015). *Pengaruh DAU, DAK, PAD, Pertumbuhan Ekonomi, DBH, Dan Kemandirian Keuangan Fiskal Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kurniawan, R. C. (2013). Analisis Pengaruh PDRB, UMK, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Malang Tahun 1980-2011. 5.
- Lubis, N. H., & Syarvina, W. (2023). Analisis Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 155.
- Mudji, A., & Taripar, W. (2018). Analisa Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota Malang. *Pangripta*, 37.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory : Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 2*, 178.
- Nur'ainy, R., Desfitriana, & Utomo, R. B. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat). *PESAT(Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*, 95-103.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 299-312.
- Syahril, M., DM, R., & Handayani, D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 683.
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 81.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Pemerintah Pusat. (2004). *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Pusat. (2004). *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat. (2011). *Peraturan Menteri Keuangan No 101/PKM.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran*. Jakarta: Standar Akuntansi Pemerintah.

**Website:**

Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Provinsi*. Diambil kembali dari Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Barat-Agustus-2022.aspx>